

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan dan keberhasilan ekonomi suatu negara tercermin dalam pembangunan manusia negara tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi kita akan melihat keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan. Untuk negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang, pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. dan seiring dengan meningkatnya volume barang dan jasa yang dihasilkan, kesejahteraan dan produktivitas Masyarakat telah meningkat. dan kualitas sumber daya manusia telah meningkat (Ginting, 2008).

Pembangunan manusia merupakan upaya pembangunan ekonomi dari sudut pandang ekonom (Romer, 1990) yang menjelaskan tentang Modal manusia adalah sumber dasar produktivitas ekonomi. Modal manusia merupakan investasi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas dan keberhasilannya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial. IPM telah disepakati dunia melalui konferensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang kemudian melahirkan UNDP (*United Nation Development Programe*). Dimana untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi saja namun juga memperhatikan pembangunan manusia yang menyeluruh (Todaro M. , 2006).

Provinsi DKI Jakarta adalah ibukota Indonesia dengan perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan yang dicapai dari tahun 1975 hingga sekarang menjadikan sektor ekonomi di daerah ini dipengaruhi oleh sektor sekunder dan tersier yang merupakan kelompok sektor ciri khas perkotaan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa pada 2018 menjadikan DKI Jakarta menjadi kota dengan penduduk yang padat dan pembangunan yang pesat. Pembangunan yang pesat menjadikan DKI Jakarta selalu memiliki nilai IPM yang tinggi dan berada diatas

rata-rata nasional. Nilai IPM di DKI Jakarta yang besar, diharapkan memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Kualitas kompetensi yang lebih tinggi dinilai oleh pendidikan dan perawatan kesehatan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Hal ini didukung oleh data perkembangan IPM DKI Jakarta selama lima tahun terakhir sebagai berikut: (Bhakti, 2014).

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dan DKI Jakarta Pada Tahun 2016 s.d 2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Seribu	69,52	70,11	70,91	71,40	71,63
Jakarta Selatan	83,94	84,13	84,44	84,75	84,72
Jakarta Timur	81,28	81,61	82,06	82,69	82,66
Jakarta Pusat	80,22	80,49	81,01	81,24	81,39
Jakarta Barat	80,34	84,47	80,88	81,21	81,38
Jakarta Utara	78,78	79,47	79,88	80,17	80,29
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

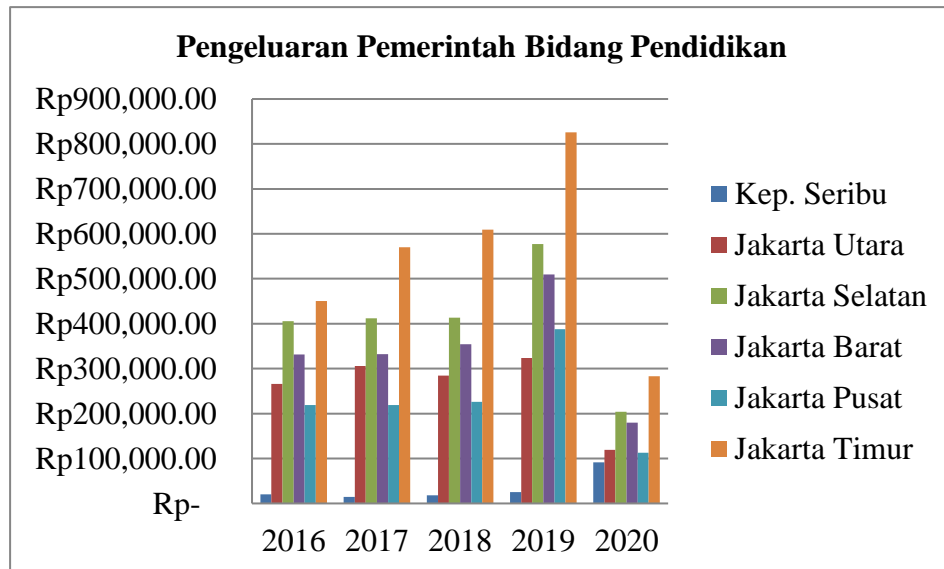
Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Bersumber pada Tabel 1.1, di DKI Jakarta mengalami peningkatan nilai IPM yang terjadi di DKI Jakarta. Jakarta Selatan mendapatkan nilai IPM yang paling tinggi bahkan dari IPM di tingkat nasional, sedangkan Kepulauan Seribu menempati peringkat terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Selatan memiliki peningkatan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas dengan mengelompokkan konsentrasi produktivitas menurut pengetahuan profesional penduduk desa setempat melalui peningkatan pendidikan. (Santika, 2014).

Pendidikan memiliki hubungan positif terhadap peningkatan IPM, dalam hal ini menggunakan indikator pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, sebagaimana diketahui bahwasanya dalam penciptaan kualitas sumber daya manusia membutuhkan sarana dan prasarana sebagai media untuk pembentukan investasi dalam modal manusia dan oleh karenanya membutuhkan dorongan dalam bentuk anggaran karena pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk

menjamin kebutuhan publik seperti kebutuhan akan pendidikan. Didukung dengan data perkembangan pengeluaran pemerintah DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir (Muliza, Zulham, & Seftarita, 2017).

Grafik 1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan DKI Jakarta (Dalam Satuan Miliar) pada Tahun 2016-2020

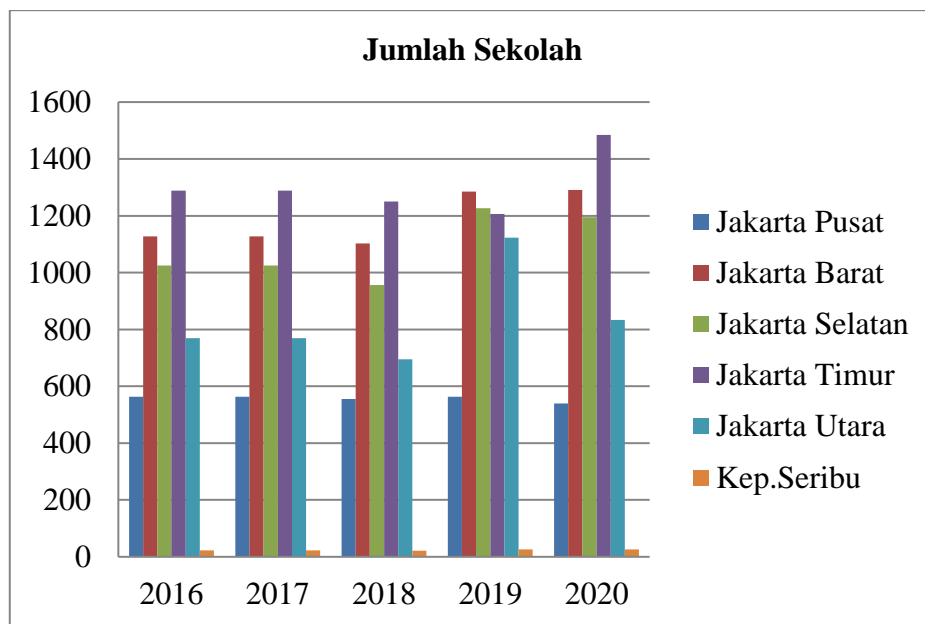


Sumber: Publikasi PPID DKI Jakarta, 2020

Terlihat pada Grafik 1 diatas bahwa selama 5 tahun terakhir umumnya terjadi peningkatan dalam pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, nilai tertinggi berada pada tahun 2019, sedangkan nilai terendah berada di tahun 2020 . Dalam hal ini jika dilihat data antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan IPM, dapat terlihat bahwa terdapat *gap* yaitu ketika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menurun, IPM justru meningkat, dimana keduanya seharusnya memiliki hubungan positif. Dimana alokasi dana pendidikan dapat membawa dampak positif bagi modal manusia yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Efektifitas akan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menjadi masalah yang sering dihadapi kota-kota di negara berkembang seperti DKI Jakarta (Prasetyo & Zuhdi, 2013). Pemerintah belum mampu dalam memanfaatkan secara efektif dan efisien alokasi dana yang ditujukan untuk Pendidikan. Hal ini membuat pemenuhan akan peningkatan nilai IPM belum terpenuhi (Muliza, Zulham, & Seftarita, 2017)

Salah satu bentuk alokasi dana pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah pada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah (SD,SMP,dan SMA). Infrastruktur ini merupakan usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan akan semakin tingginya angka putus sekolah karena alasan kurangnya fasilitas pendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian selain dibutuhkannya pengeluaran berupa anggaran diperlukan pula pembangunan sekolah sebagai bentuk penyaluran anggaran dengan didukung oleh data jumlah sekolah dalam 5 tahun terakhir (Rubiyatno, 2012).

Grafik 2. Jumlah sekolah di DKI Jakarta Pada Tahun 2016-2020



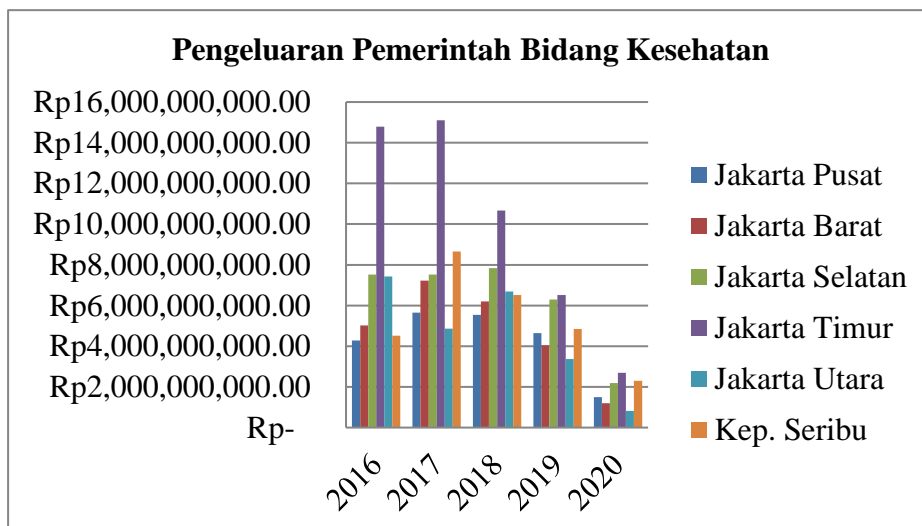
Sumber: Publikasi BPS, 2020

Pada Grafik 2 diatas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir umumnya terjadi peningkatan dalam tersedia jumlah sekolah di DKI Jakarta, jumlah tertinggi berada pada tahun 2019, sedangkan nilai terendah berada di tahun 2016 dan 2017 karena tidak adanya kenaikan jumlah sekolah . Dalam hal ini jika dilihat data antara jumlah sekolah dan IPM dapat terlihat bahwa terdapat *gap* yaitu ketika jumlah sekolah menurun, IPM justru meningkat, dimana keduanya seharusnya memiliki hubungan positif. Fasilitas pembagunan belum tentu mempengaruhi pembangunan manusia (Rubiyatno, 2012). Namun, percepatan dan pemerataan pendidikan formal secara kuantitatif sering diukur sebagai

keberhasilan pembangunan. Dapat dilihat jika masih belum meratanya infrastruktur yang tersedia di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan Kepulauan Seribu yang memiliki jumlah sekolah paling sedikit padahal berada di ibu kota (Todaro M. , 2006).

Dalam pembangunan manusia, tidak hanya pendidikan tetapi juga kesehatan merupakan faktor penting. Alokasi dana untuk Kesehatan dari APBD, berhubungan positif dengan IPM. Dimana pengeluaran pemerintah menjadi cerminan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan adalah bentuk dukungan berupa dana dan perhatian pemerintah dalam usaha peningkatan kualitas SDM yang kemudian harus ditunjang oleh fasilitas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan data 5 tahun terakhir (Baeti, 2013).

Grafik 3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan DKI Jakarta pada Tahun 2016-2020



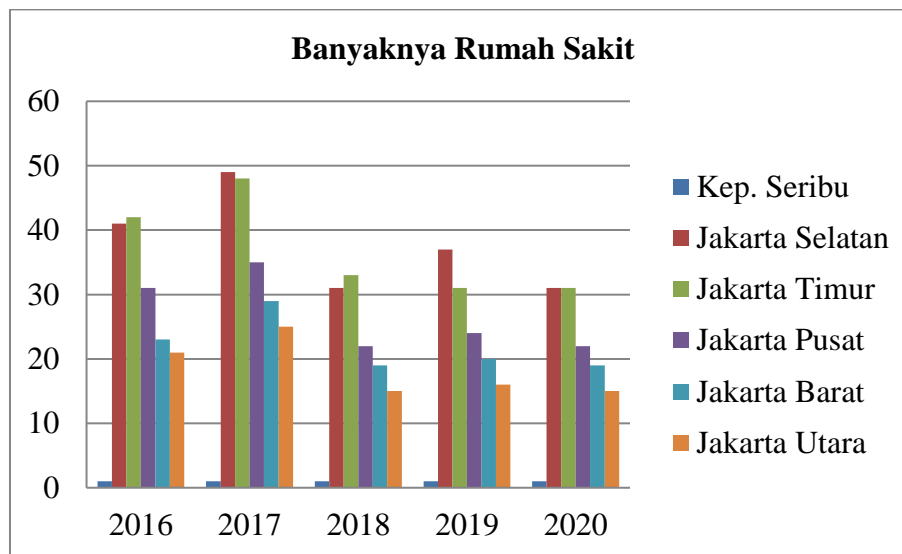
Sumber : Publikasi PPID, 2020

Pada grafik 3 diatas dapat dilihat terjadinya fluktuasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan pada 5 tahun terakhir. Dimana pengeluaran tertinggi berada pada tahun 2017 dan terendah pada 2020. Dalam hal ini, jika kita melihat data pengeluaran kesehatan masyarakat, kita melihat bahwa pertumbuhan IPM menciptakan kesenjangan yang mengurangi pengeluaran pemerintah di sektor perawatan kesehatan. Sementara itu, belanja publik untuk kesehatan pada dasarnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Kesehatan

juga merupakan faktor penting dalam kehidupan, yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya (Santoso, Hamzah, & Syechalad).

Usaha dalam peningkatan kualitas SDM dilakukan pemerintah bukan hanya dari bentuk dukungan dana melalui pengeluaran pemerintah bidang kesehatan. Namun juga dalam bentuk pengalokasiannya terhadap infrastruktur berupa bangunan rumah sakit umum yang tersedia di wilayah DKI Jakarta. Dimana ketersediaan infrastruktur kesehatan berupa rumah sakit umum merupakan bagian dari pembangunan nasional karena bidang kesehatan merupakan mata rantai yang terintegrasi, terukur, dan teratur. Hal tersebut didukung dengan data 5 tahun terakhir (Pohan & Halim, 2015).

Grafik 4. Jumlah Rumah Sakit di DKI Jakarta Pada Tahun 2016-2020



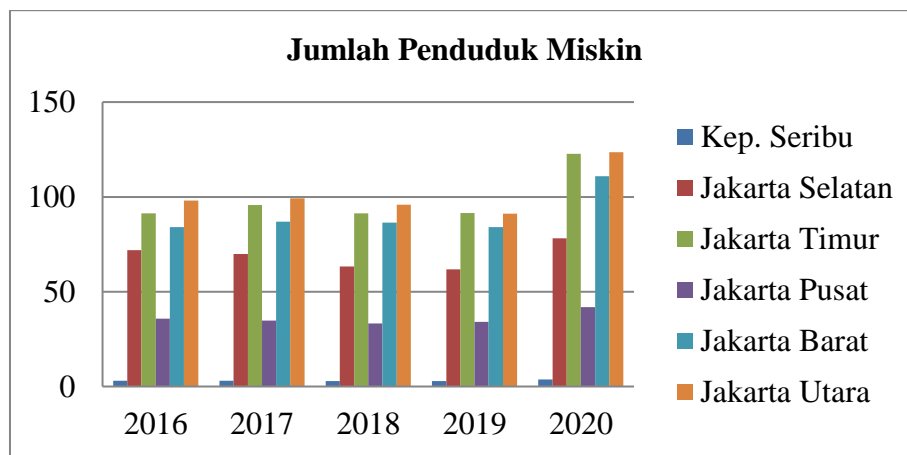
Sumber : Publikasi BPS, 2020

Pada grafik 4 terlihat jika adanya fluktuasi banyaknya jumlah rumah sakit umum yang ada di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Kepulauan Seribu menjadi daerah dengan jumlah paling sedikit, sedangkan Jakarta Selatan menjadi daerah yang memiliki jumlah rumah sakit umum yang paling banyak di DKI Jakarta. Dapat dilihat pada grafik 4 adanya *gap* yang terjadi dimana ketika IPM meningkat jumlah rumah sakit umum belum tentu meningkat bahkan cenderung turun. Dimana seharusnya dalam ketersediaan infrastruktur kesehatan berupa rumah sakit umum dalam upaya peningkatan kualitas SDM berhubungan positif. Dalam

meningkatkan kualitas SDM seperti Angka Harapan Hidup (AHH) perlu memperhatikan ketersediaan rumah sakit (Hickel, 2019).

Selanjutnya kemiskinan memiliki hubungan negatif terhadap IPM. Artinya setiap kenaikan nilai IPM mengurangi kemiskinan, yang dalam studi ini mempertimbangkannya dari jumlah penduduk miskin yang ada. Kemiskinan merupakan masalah di semua negara. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Karena kemiskinan itu kompleks. dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak segi karena kebutuhan orang berbeda-beda.. Hal ini didukung dengan data 5 tahun terakhir (Susanti, 2013).

Grafik 5. Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta pada Tahun 2016-2020



Sumber : Publikasi BPS, 2020

Dari grafik 5. diatas dapat terlihat bahawa adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada kurun waktu 2017-2019 sedangkan pada 2017 dan 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Dalam data jumlah penduduk miskin dengan IPM, dapat dilihat terjadi *gap* antara jumlah penduduk miskin dengan IPM. Dengan meningkatnya IPM, jumlah penduduk miskin justru meningkat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum. Masalah standar hidup yang buruk terkait dengan pendapatan yang rendah. Kesehatan dan perawatan medis yang buruk dan pendidikan negara yang buruk sebagai akibat dari pekerjaan yang menurun (Kuncoro, 2000).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena variabel pendidikan dan kesehatan berdampak positif terhadap pembangunan manusia. dan ada korelasi negatif antara variabel kemiskinan dan pembangunan manusia. Hal ini

ditunjang dari penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fadilah, Candra Fajri Ananda, dan David Kaluge yang berjudul *A Panel Approach: Does Government Expenditure Influence Human Development Index?* Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran perawatan kesehatan pemerintah, dan kesiapan untuk mendukung infrastruktur pendidikan dan perawatan kesehatan akan berkontribusi terhadap IPM. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Muliza, T. Zulham, dan Chenny Seftarita yang berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh yang membuktikan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan di daerah/kota Aceh tidak berdampak signifikan terhadap IPM. Di satu sisi, angka kemiskinan berdampak negatif bagi daerah/kota Aceh, di sisi lain, kata IPM. Ketika tingkat kemiskinan turun, IPM meningkat. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Danu Prasetyo, dan Ubaidillah Zuhdi yang berjudul *The Government Expenditure Efficiency Towards The Human Development* yang membandingkan efisiensi belanja publik dengan peningkatan IPM di 81 negara di banyak negara dengan ambang batas kinerja antara tahun 2006 dan 2010, yang menunjukkan lambatnya perkembangan milenium. Dari uraian ini diperlukan kajian sebagai rekomendasi untuk pengambilan keputusan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, hal ini melatarbelakangi penelitian dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta pada 2016-2020*)”

I.2 Perumusan Masalah

Indeks pembangunan manusia DKI Jakarta terus meningkat, dalam 5 tahun terakhir laju pertumbuhannya sudah sangat tinggi bahkan di atas rata-rata nasional. Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai indeks pembangunan manusia sebesar 80,33 sedangkan nilai IPM tingkat nasional sebesar 71,24. Tetapi masalahnya adalah infrastruktur seperti jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, dimana belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan cukup besar. Nyatanya, hal itu belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Karena banyaknya masyarakat yang tergolong penduduk miskin justru terus meningkat. Penelitian ini ingin mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi

indeks pembangunan manusia yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Jumlah sekolah, Jumlah rumah sakit, Jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan penjelasan tersebut, timbulah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh jumlah jumlah sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh jumlah rumah sakit umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta?
5. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, timbulah tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta.
3. Untuk menganalisa pengaruh jumlah sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta.
4. Untuk menganalisa pengaruh jumlah rumah sakit umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta
5. Untuk menganalisa pengaruh banyaknya orang miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pengembangan di bidang penelitian dan juga perkuliahan.
- b. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta masukan bagi para pemegang kebijakan terkait dalam menetapkan kebijakan di masa depan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang variabel yang di teliti serta wujud dari sumbangan pemikiran bagi kepentingan bidang ilmiah.